

LKjIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



**DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2024**

JL. AW SOEMARMO 44-46 PURBALINGGA

PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT. yang atas berkat rahmat dan karuniaNya, telah diselesaikan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Kabupaten Purbalingga tahun 2024. Laporan ini dibuat sebagai wujud pertanggungjawaban unit kerja kepada publik dalam memantau sejauh mana terselenggaranya pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Penyusunan LKJIP 2024 ini masih berpedoman pada PERPRES No.29 Tahun 2014. Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dan PERMENPAN No.53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja. Sistem Akuntabilitas dalam Ketentuan ini disusun suatu model peranggungjawaban pejabat publik dan kinerja pejabat publik, dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan, akan dapat dinilai secara lebih transparan, akuntabel dan komprehensif.

Sejalan dengan kemajuan ilmu dan teknologi, tuntutan publik terhadap pelayanan pemerintah juga mengalami banyak permasalahan. Masyarakat menuntut adanya transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Langkah-langkah kongkrit yang dipandang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sangat diharapkan. Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Kabupaten Purbalingga pada tahun 2024 telah mengupayakan secara maksimal untuk dapat menunjukkan kinerja yang lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Namun, kami menyadari adanya berbagai faktor yang mempengaruhi kinerja instansi pemerintah, dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.

Kami berharap Laporan Kinerja ini dapat menjadi pegangan semua pihak untuk memberikan koreksi kearah positif demi kemajuan pembangunan Ketahanan Pangan dan perikanan di Kabupaten Purbalingga. Semoga laporan ini bermanfaat bagi semua pihak yang mengkajinya.

Purbalingga, Januari 2025

**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN PURBALINGGA**

Drs. Mohammad Najib,M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19651215 199303 1 010

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
.....	
KATA PENGANTAR	1-2
.....	
DAFTAR ISI	3
.....	
DAFTAR TABEL	4
.....	
BAB I PENDAHULUAN	5
.....	
1.1 Latar Belakang	5
.....	
1.2 Gambaran Organisasi	7
.....	
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
.....	
2.1 Rencana Strategis	8
.....	
2.2 Perjanjian Kinerja	10
.....	
BAB III AKUNTABILITASKINERJA	12
.....	
3.1 Capaian Kinerja	12
.....	
3.2 Realisasi Anggaran	31
.....	
BAB IV PENUTUP	35
.....	
4.1 Simpulan	35
.....	
4.2 Saran	36
.....	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kepada Bupati Purbalingga, Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024 Laporan ini disusun sesuai dengan Format yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan irokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja ,Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini memuat hasil pengukuran sasaran strategis Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Kabupaten Purbalingga dan Program/kegiatan melalui Indikator Kinerja (parameter) yang telah ditetapkan sesuai tugas pokok dan fungsinya.Sumber dana Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Kabupaten Purbalingga untuk program dan kegiatan yang dilaksanakan tahun 2024 berasal dari APBD Kabupaten Purbalingga tahun anggaran 2024.

Indikator Kinerja Sasaran merupakan parameter untuk mengukur keberhasilan pelayanan yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Kabupaten Purbalingga dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian sasaran tingkat Pemerintah Kabupaten Purbalingga tahun 2024.Indikator kinerja sasaran menggunakan indikator Kinerja Kunci yang dipilih dari beberapa output dan atau outcome dari kegiatan.Indikator Kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (Input) yang mengutamakan penggunaan penggunaan dana APBD Kabupaten Purbalingga ,Indikator keluaran (output)dan indikator hasil (outcome)sesuai daftar Pengesahan Anggaran (DPA) Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Kabupaten Purbalingga

B. Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Kabupaten Purbalingga didasarkan pada peraturan perundang-undangan antara lain sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 59);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Rencana Strategis Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan 2013 - 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor. 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor. 08 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 – 2026;
15. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor. 95 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga
16. Surat Edaran nomor: 000.8.6.3/ 23052 /2024 mengenai Pedoman Implementasi sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan disusunnya Laporan Kerja Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 adalah:

1. Untuk mengetahui pencapaian kinerja sasaran strategis Dinas Ketahanan Pangan dan perikanan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RENSTRA Dinas Ketahanan pangan Dan Perikanan Kabupaten Purbalingga.
2. Sebagai acuan untuk perencanaan kegiatan di tahun mendatang, khususnya dalam perencanaan kerja tahun mendatang.
3. Sebagai bukti akuntabilitas kepada publik atas penggunaan sumber daya dalam rentang waktu 1 (satu) tahun.

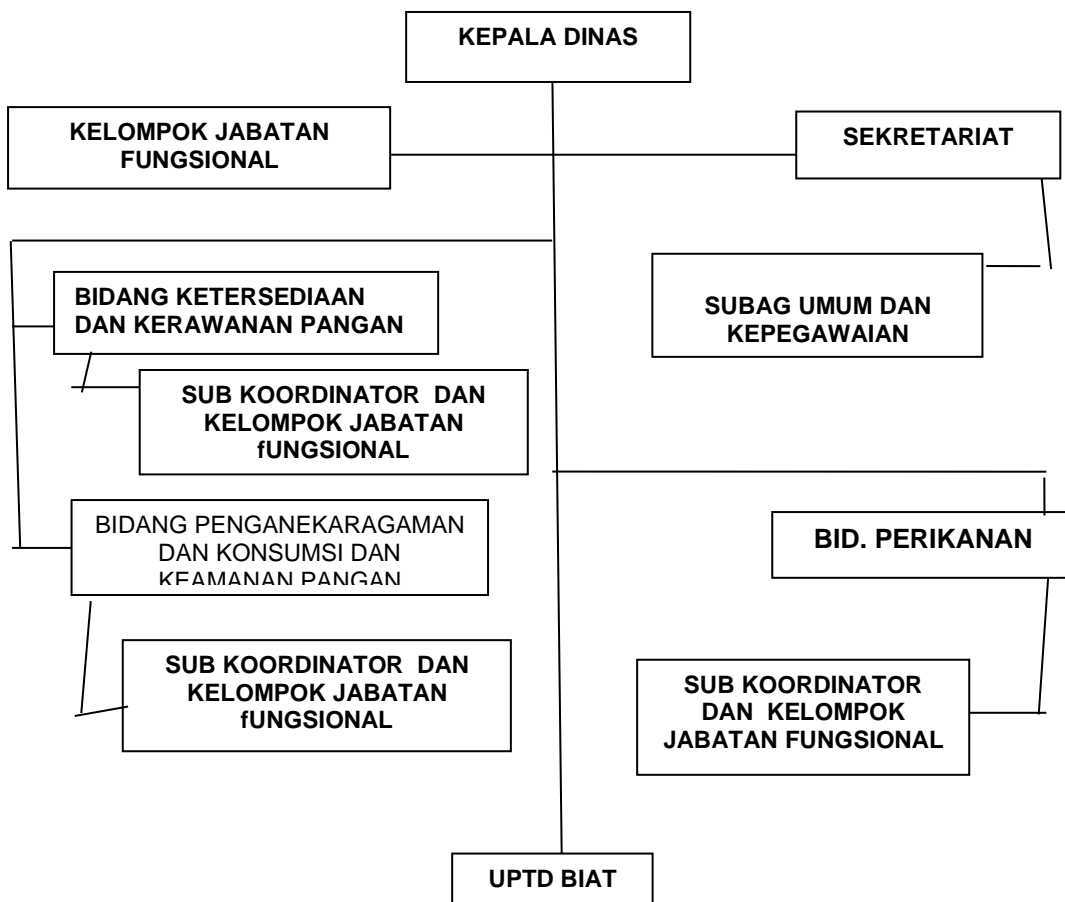
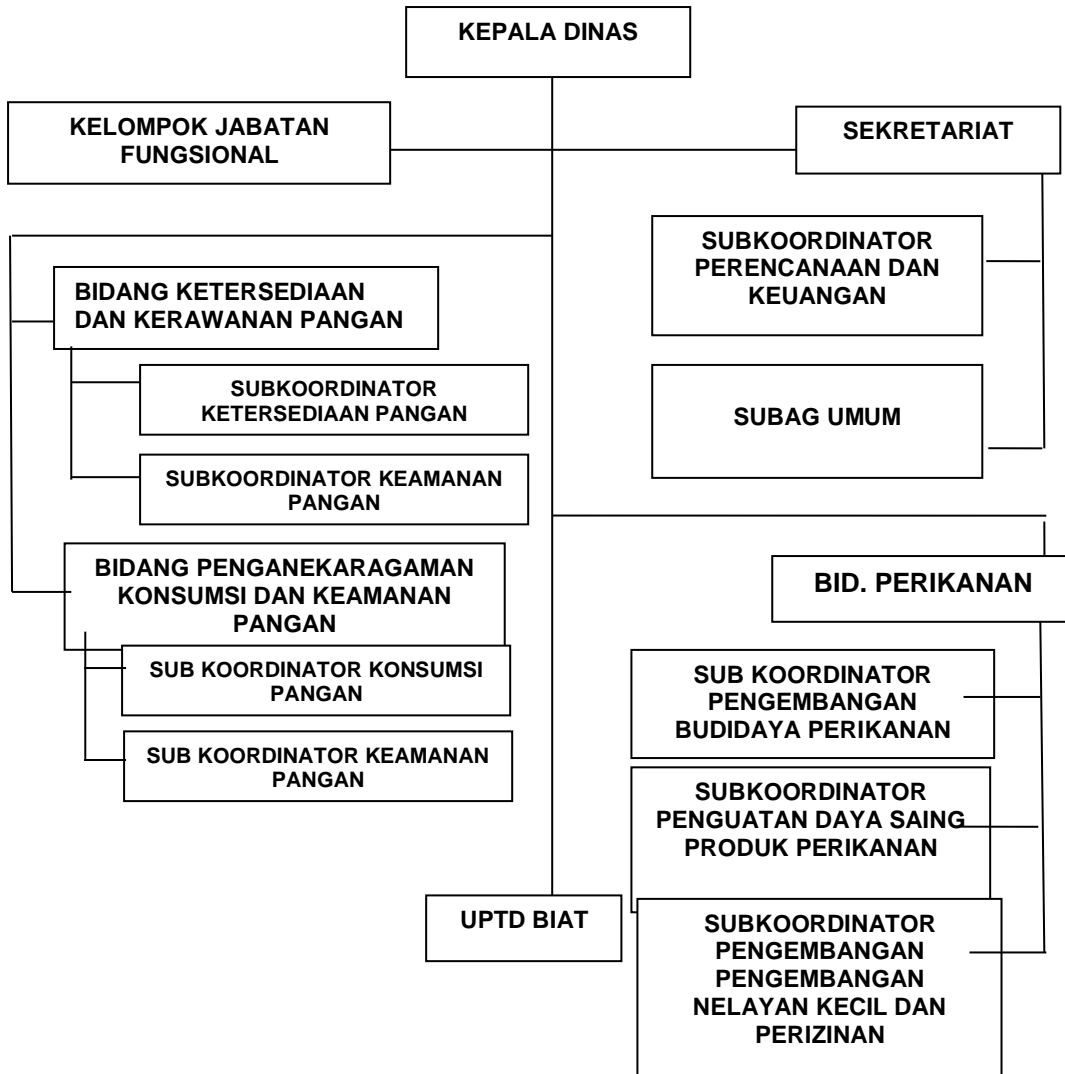
D. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

A. Struktur Organisasi dan Tata kerja

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga dibentuk dengan Peraturan daerah No 54 Tahun 2022, tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja Dinas Ketahanan Pangan, dan dipimpin oleh seorang kepala dinas membawahi 1 orang sekretaris, 3 kepala bidang, 1 kepala UPTD. Adapun sekretariat, bidang, sub bagian, subkoordinator dan UPTD adalah sebagai berikut:

- a. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian..
- b. Bidang Ketahanan Pangan, terdiri dari :
 1. Subkor ketersediaan pangan
 2. Subkor kerawanan pangan
- c. Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan pangan
 1. Subkord penganekaragaman dan konsumsi pangan;
 2. Subkord pengawasan dan Keamanan Pangan;
- c. Bidang Perikanan, terdiri dari :
 1. Subkord Pengembangan Budidaya Perikanan..
 2. Subkord Penguatan Daya Saing Produk Perikanan.
 3. Subkord Pengembangan Nelayan Kecil dan Perizinan
- d. UPTD, terdiri dari :
 1. UPTD BIAT Kutasari
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional..

Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Kabupaten Purbalingga



1. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga (DKPP) merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas di sektor Ketahanan Pangan dan perikanan, dipimpin oleh kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dimana Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan secara lebih jelas dan detail tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2022 yakni:

- Perumusan Kebijakan Ketahanan Pangan dan Perikanan
- Pelaksanaan koordinasi Kebijakan Ketahanan Pangan dan Perikanan
- Pelaksanaan Kebijakan Ketahanan Pangan dan Perikanan
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Ketahanan Pangan dan Perikanan
- Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas
- Pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD dan Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati

2. Kepegawaian

Jumlah PNS di Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan per 31 Desember 2024 adalah sebanyak 41 orang terdiri 29 ASN, 1 orang PPPK dan 11 THL, Dimana ASN terbagi atas yang terbagi atas :

A. Golongan

- a. Gol IV : 6 orang
- b. Gol III : 21 orang
- c. Gol II : 1 orang
- d. Gol I : 2 orang

B. Pejabat Eselon

Pejabat eselon II 1 orang, eselon III 4 orang, eselon IV 3 orang
Pejabat fungsional 12

C. Tingkat Pendidikan ASN PNS

- a. SMP : 2 orang
- b. SLTA : 5 orang
- c. D-3 : 3 orang
- d. S-1 : 14 orang
- e. S-2 : 6 orang

E. PERMASALAHAN DAN ISU UTAMA

Isu Utama masalah yang ada saat ini adalah pembangunan daerah merupakan "gap expectation" antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Dengan keterbatasan kapasitas keuangan daerah dan karakteristik alokasi belanja daerah, tidak semua penyelenggaraan urusan dapat diprioritaskan karena

tujuan serta sasaran prioritas pembangunan daerah dalam suatu periode belum tentu terkait dengan seluruh urusan pemerintahan. Namun demikian, tidak berarti bahwa urusan dimaksud tidak diselenggarakan Pemerintah Daerah. Secara operasional, urusan-urusan tersebut tetap harus dilaksanakan untuk menjaga kinerja yang telah dicapai di masa-masa lalu atau memenuhi standar layanan bagi masyarakat. Analisis permasalahan pembangunan diseluruh urusan penyelenggaraan pemerintahan dimaksudkan guna menjamin diperolehnya identifikasi permasalahan penyelenggaraan seluruh urusan pemerintahan, diluar permasalahan program pembangunan daerah.

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu pilar dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat dengan sendirinya akan meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat yang pada akhirnya akan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2014 PDRB per kapita Kabupaten Purbalingga sebesar Rp. 15,95 juta, masih jauh lebih rendah dibanding PDRB per kapita Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar Rp. 27,61 juta, dan PDB per kapita Nasional sebesar Rp. 41,81 juta.

Dalam struktur PDRB Kabupaten Purbalingga, Sektor Pertanian masih memberi kontribusi terbesar yaitu sebesar 30,00 persen disusul Sektor Industri Pengolahan (23,50 persen), serta Sektor Perdagangan Besar dan Eceran (14,21 persen). Meskipun angka PDRB per kapita relatif kecil tetapi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purbalingga dari tahun ke tahun cukup baik yaitu rata-rata 5,7 persen per tahun dalam lima tahun terakhir. Dalam beberapa tahun terakhir pertumbuhan Sektor Pertanian cenderung mengalami penurunan (lebih rendah dibanding pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan dan Jasa). Di sisi lain sektor sekunder dan tersier terus bertumbuh dengan lebih cepat seiring dengan perkembangan teknologi dan permintaan produk-produk manufaktur dan jasa.

Saat ini isu pangan, iklim dan Global war food masih menjadi permasalahan global dan itu terjadi di semua negara termasuk Indonesia. Maka perlu dicari solusi pemecahan masalah tersebut.

F.. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Dinas Ketahanan pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Cover/Sampul Muka

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Kedudukan, Tugas pokok, dan Fungsi
- E. Permasalahan Utama
- F. Sistematika penulisan LKJIP

BAB II Perencanaan Kinerja

- A. Rencana Strategis
 - 1. Rencana Strategis
 - 2. Indikator Kinerja Tujuan
 - 3. Target Indikator Kinerja Sasaran
- B. Perjanjian kinerja Tahun 2024

BAB III Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

- A. Capaian Kinerja Perangkat Daerah
 - 1. Indikator Kinerja tujuan
 - 2. Target Indikator kinerja Sasaran
- B. Realisasi Anggaran

BAB IV Penutup

Lampiran

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

A..PERENCANAAN STRATEGIS

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai Visi, melaksanakan Misi, dan menangani isu strategis yang dihadapi. Adapun Visi Bupati Terpilih dimaksud adalah **"PURBALINGGA YANG MANDIRI DAN BERDAYA SAING, MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA YANG BERAKHLAK MULIA"**.

Tujuan, Sasaran, Strategi,
dan Arah Kebijakan Dinas
Ketahanan Pangan dan
Perikanan Kabupaten
Purbalingga
Tahun 2021 - 2026

VISI : "Purbalingga Yang Mandiri Dan Berdaya Saing, Menuju Masyarakat Sejahtera Yang Berakhlak Mulia"
--

MISI 3	:	Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok manusia utamanya pangan dan papan secara layak		
MISI 5	:	Mempercepat Pertumbuhan Dan Pemerataan ekonomi rakyat dengan mendorong simpul simpul perekonomian utamanya industri kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan lapangan kerja		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
meningkatkan kesejahteraan masyarakat	meningkatkan ketercukupan pangan masyarakat	meningkatkan ketahanan pangan masyarakat	Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat melalui peningkatan ketersediaan, distribusi, dan konsumsi dan keamanan pangan masyarakat;	
Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Daerah	Meningkatnya Produktifitas dan Nilai Tambah ekonomi Daerah	Mengembangkan Inovasi untuk peningkatan produksi dan Produktifitas Daerah	Optimalisasi Pengelolaan Perikanan Budidaya, Tangkap dan Pengolahan secara Berkelanjutan serta berdaya saing	

Rumusan tujuan merefleksikan konteks rencana pembangunan yang dihadapi OPD dan memiliki keterkaitan dengan visi misi daerah yang ingin dicapai. Pernyataan tujuan tersebut diterjemahkan dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai.

Sebagaimana diketahui misi daerah kabupaten Purbalingga sesuai RPJMD Kabupaten Purbalingga yang berkaitan dimana pencapaiannya dapat didukung oleh Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan yaitu pada Misi ke 3 yakni **Mengupayakan Pangan Pokok secara Layak** dan 5 yaitu **Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat, dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya dalam industri pengolahan dan manufaktur, pertanian, perdagangan, jasa, pariwisata, UMKM dan ekonomi kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja**”.

Tujuan jangka menengah RPJMD Kabupaten Purbalingga yang ingin dicapai dari Misi ke-5 adalah meningkatnya daya saing ekonomi daerah. Upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dilakukan dengan mendorong peningkatan produksi dan nilai tambah pada masing-masing sektor ekonomi. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak serta merta meningkatkan pendapatan per kapita riil seluruh masyarakat apabila tidak terdistribusi secara merata. Sejalan dengan tujuan RPJMD tersebut yang dapat didukung pencapaiannya sesuai tugas dan fungsi OPD di bidang pangan dan perikanan maka Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Kabupaten Purbalingga mempunyai tujuan **“Meningkatnya nilai tambah sektor pertanian**

Sasaran pembangunan pangan dan perikanan yang akan dicapai selama periode tahun 2021-2026 adalah **“Meningkatnya nilai produksi pangan dan Meningkatkan angka konsumsi ikan .“**

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran perlu dikemukakan indikator kinerja Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Kabupaten

Purbalingga yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Kabupaten Purbalingga dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja tujuan yakni **meningkatnya nilai tambah sektor pertanian** yang juga merupakan **indikator kinerja sasaran** meningkatnya penempatan kerja adalah **meningkatnya nilai produksi pangan dan Perikanan**

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan pernyataan/kesepakatan/perjanjian kinerja untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembaran/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Indikator kinerja ini dijadikan acuan untuk OPD menjalankan kinerja dengan cermat agar tujuan dari OPD bisa tercapai

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil kinerja, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Purbalingga telah Menyusun Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 yang telah disepakati antara Kepala DKPP dengan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 yaitu sebagai berikut:

**PERJANJIAN KINERJA
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2024**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2024
Meningkatnya status pangan masyarakat		Indek Ketahanan pangan	Angka/ Nilai	82,7
	Meningkatnya status pangan masyarakat	Skor PPH	Angka	91
	Meningkatnya Kualitas kelembagaan DKPP	Nilai Sakip DKPP	Angka	68,68
		Nilai kematangan OPD		38
Meningkatnya Nilai tambah Sektor Perikanan		PDRB Sektor Perikanan	Angka	455.000.000.000
	Meningkatnya Nilai Produksi Ikan	Nilai Produksi Perikanan tangkap,hias,budidaya dan pengolahan	Rupiah	311.863.013.400

Untuk mencapai target kinerja tersebut, DKPP telah didukung dengan 8 Program, 21 kegiatan dan 26 Sub kegiatan sumber anggaran APBD Kabupaten Purbalingga sebesar Rp. 6.514.185.000,-

PROGRAM	ANGGARAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.159.376.000
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	1.600.000
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	77.000.000
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	432.800.000
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	15.200.000
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	28.200.000
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	753.266.000
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	46.744.000
JUMLAH	6.514.185.000

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Akuntabilitas Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan merupakan Perwujudan kewajiban Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan perikanan Tahun 2023 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Pengukuran tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yg ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 Maupun Rencana Kerja Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, Pengukuran Kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Pengukuran yang dilakukan Dinas Ketahanan pangan dan Perikanan di dasarkan pada tingkat capaian kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Ketahanan pangan Dan Perikanan Tahun 2021 – 2026. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

	Interval Nilai Realisasi kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
	76% ≤ 90%	Tinggi
	66% ≤ 75%	Sedang

	51% ≤ 65%	Rendah
	≤ 50%	Sangat rendah

1. Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan hasil pengukuran Kinerja Sasaran, Indikator Kinerja, Target dan Realisasinya tercermin dalam tabel sebagai berikut :

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2024**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2023	TARGET 2024	CAPAIAN 2024	Capaian (%)
Meningkatnya status pangan masyarakat		Indek Ketahanan pangan	Angka/ Nilai	78,05	82,7	78,47	94,88
	Meningkatnya status pangan masyarakat	Skor PPH	Angka	90,7	91	90,3	99,23
	Meningkatnya Kualitas kelembagaan DKPP	Nilai Sakip DKPP	Angka	63,96	<u>68,68</u>	<u>69,41</u>	<u>101,6</u>
		Nilai kematangan OPD			<u>38</u>	<u>38</u>	<u>100</u>
Meningkatnya Nilai tambah Sektor Perikanan		PDRB Sektor Perikanan	Angka	<u>509.287.520.000</u>	<u>455.000.000.000</u>	<u>Blm release</u>	<u>NA</u>
	Meningkatnya Nilai Produksi Ikan	Nilai Produksi Perikanan tangkap, hias, budidaya dan pengolahan	Rupiah	306.642.970.000	311.863.013.400	355.522.255.217	113,99

Dari tabel diatas, pencapaian atas Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Kabupaten Purbalingga di Tahun 2024 menunjukkan rata-rata capaian kinerja 101,94 atau kategori **Sangat Tinggi**. Hal tersebut dilakukan penilaian diluar nilai PDRB yang belum release karena BPS selaku pemangku data belum mngeluarkan angka acapaian PDRB di tahun 2024

Pencapaian atas capaian masing-masing indikator kinerja tujuan dan indikator kinerja sasaran sesuai dengan tabel tersebut diatas adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Indeks Ketahanan Pangan

Data capaian Indeks Ketahanan Pangan

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Capaian 2023	Target	Capaian 2024	Realisasi 2024	Capaian akhir renstra (2021-2026)
Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Angka	79,85	80,15	79,33	79,25	78,05	82,7	78,47	94,88 %	84,3

Secara Nasional setiap tahun Laporan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Badan Ketahanan Pangan Nasional. Peningkatan pencapaian Indeks Ketahanan Pangan (IKP) diklasifikasikan dalam kategori IKP Kabupaten, IKP Kota dan IKP Provinsi.

Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir ada kecenderungan mengalami penurunan baik dari sisi pencapaian skor IKP maupun peringkat. Pada tahun 2022 IKP Kabupaten Purbalingga diangka lagi ke 79,25 dan pada tahun 2023 IKP Kabupaten Purbalingga mengalami penurunan menjadi 78,05 dan naik kembali di tahun 2024 sebesar 78,47 sehingga ada perbaikan Indeks ketahanan pangan di Kabupaten Purbalingga.

Cara kita melihat skor Indeks Ketahanan Pangan (IKP) harus secara komprehensif yaitu melihat dari besarnya skor dan posisi peringkat secara nasional dikomparasikan dengan skor yang menggambarkan katagorisasi suatu daerah termasuk daerah yang tahan pangan atau rentan. Meskipun secara skor dan peringkat Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten Purbalingga ada kecenderungan mengalami penurunan dalam tiga tahun terakhir tetapi dari sisi skor yang diperoleh masih masuk dalam katagori daerah yang sangat tahan pangan, karena skornya masih diatas 70, disamping itu secara peringkat Kabupaten Purbalingga juga termasuk diatas atau diatas setengah dari jumlah Kabupaten. Berdasarkan peringkat IKP Kabupaten secara , lima kabupaten dengan urutan skor terbaik adalah Gianyar (92,16) dan Badung (91,59) di Provinsi Bali, Sukoharjo (91,02) di Provinsi Jawa Tengah, Tabanan (90,54) di Provinsi Bali, serta Gresik (90,39) di Provinsi Jawa Timur. Sedangkan lima kabupaten dengan urutanskor terendah berada di Provinsi Papua, yaitu Intan Jaya (14,54), Nduga (17,64), Mamberamo Tengah (20,06), Puncak (20,10), dan Paniai (21,52) sedangkan Purbalingga berada di posisi 189 dengan angka 78,47 dari 416 kabupaten kota diseluruh indonesia yang dilakukan pengjitungan IKP.

Ada sembilan indikator yang digunakan dalam penyusunan IKP yang merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Kesembilan indikator tersebut meliputi :

A. Aspek Ketersediaan Pangan (Total 0,3)

1. Rasio Konsumsi normatif terhadap produksi bersih beras, jagung, ubi jalar, ubi kayu dan sagu serta stock beras pemerintah daerah.

B. Aspek Keterjangkauan Pangan (Total 0,3)

1. Persentase penduduk dibawag garis kemiskinan
2. Persentase RT dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65 % terhadap total pengeluaran
3. Persentase RT tanpa akses listrik

C. Aspek Pemanfaatan Pangan (Total 0,4)

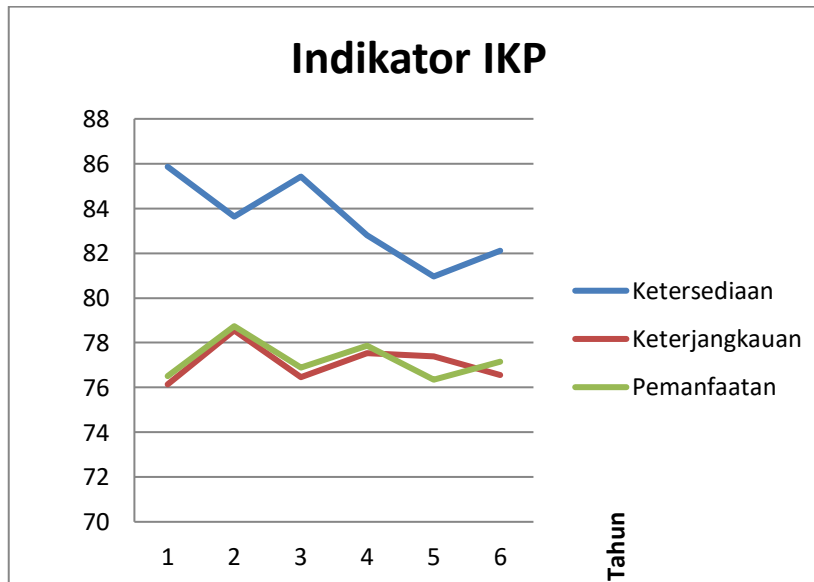
1. Rata-rata lama sekolah perempuan berusia diatas 15 tahun
2. Persentase RT tanpa akses air bersih
3. Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk
4. Persentase balita stunting

5. Angka harapan hidup pada saat lahir

Dari 9 Indikator diatas, tupoksi dari Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan hanya satu indikator yaitu pada Indikator ketersediaan pangan. Dari ketiga aspek diatas, untuk Kabupaten Purbalingga dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tahun	IKP	Aspek		
		Ketersediaan	Keterjangkauan	Pemanfaatan
2019	79,2	85,86	76,14	76,51
2020	80,15	83,63	78,55	78,74
2021	79,33	85,43	76,47	76,9
2022	79,25	82,8	77,54	77,86
2023	78,05	80,96	77,4	76,35
2024	78,47	82,12	76,55	77,16

Tabel Indikator IKP



Grafik Indikator IKP

Dari data diatas dapat dilihat bahwa angka IKP Kabupaten Purbalingga terjadi kenaikan pada tahun 2020 sebesar 0,95, hal ini dapat terlihat pada prosentase di aspek

keterjangkauan dan pemanfaatan yang sama-sama meningkat. Masuk di tahun 2021 IKP Kabupaten Purbalingga mengalami penurunan sebesar 0,82 yang dapat dilihat dari menurunnya 2 aspek ketahanan pangan. Pada tahun 2022 IKP Kabupaten Purbalingga kembali mengalami penurunan sebesar 0,08 yang dapat dilihat dari menurunnya aspek ketersediaan sebanyak 2,63 dimana untuk aspek ketersediaan pangan mempunyai andil sebesar 0,3 % dari total IKP. Pada tahun 2023 IKP Kabupaten Purbalingga mengalami penurunan menjadi 78,05.

Apabila dilihat lebih jauh kecenderungan penurunan IKP Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu tiga tahun terakhir bisa dilihat dari tiga kelompok komponen penyusun IKP yang menjadi dasar indikator dalam penyusunan IKP, yaitu aspek ketersediaan pangan, aspek keterjangkauan pangan dan aspek pemanfaatan pangan. Dari ketiga aspek tersebut bisa dilihat dalam kurun waktu tiga tahun terakhir adalah sebagai berikut, untuk tahun 2021 aspek ketersediaan pangan skornya 85,43 aspek keterjangkauan 76,47 dan aspek pemanfaatan 76,90. Pada tahun 2022 untuk aspek ketersediaan pangan mengalami penurunan menjadi 82,80 aspek keterjangkauan pangan mengalami kenaikan menjadi 77,54 dan aspek pemanfaatan mengalami juga mengalami peningkatan menjadi 77,86. Pada tahun 2023 untuk aspek ketersediaan pangan mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022 menjadi 80,96 aspek keterjangkauan juga mengalami sedikit penurunan menjadi 77,40 dan aspek pemanfaatan juga mengalami penurunan menjadi 76,35;

Kecenderungan penurunan IKP terjadi ada disebabkan beberapa variable. Salah satu variable yang sangat signifikan pengaruhnya adalah terjadinya pandemi covid 19 yang mengakibatkan terjadinya perubahan secara drastis terhadap pola hidup masyarakat yang berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap penurunan skor 9 (sembilan) indikator yang digunakan dalam penyusunan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) dan bermuara pada penurunan skor komposit Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten Purbalingga.

Perbandingan IKP 2024 dengan 2023

Secara tupoksi dari 9 indikator IKP untuk Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan hanya masuk di indikator pertama yaitu rasio konsumsi normatif per kapita terhadap produksi bersih beras, jagung, ubi jalar dan ubi kayu serta stok beras pemerintah daerah. Dilihat dari indikator pertama sudah sangat baik, karena berhasil menurunkan NCPR dari 1,04 menjadi 0,98. Dari 3 Aspek (ketersediaan, keterjangkauan, pemanfaatan) pendukung IKP 2024, aspek Ketersediaan mengalami kenaikan sebesar 1,16 ; Aspek keterjangkauan mengalami penurunan sebesar 0,85 dan Aspek Pemanfaatan mengalami kenaikan sebesar 2,12. Aspek keterjangkauan meliputi :

1. Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan
2. Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan > 65 persen terhadap total pengeluaran.
3. Persentase rumah tangga tanpa akses Listrik.

Dari ketiga indikator yang masuk dalam aspek keterjangkauan tersebut kemungkinan yang menyebabkan turunnya IKP adalah indikator ketiga dimana untuk tahun 2023 persentase rumah tangga tanpa akses Listrik sudah 0 % akan tetapi tahun 2024 mengalami kenaikan menjadi 0,12 %.

Secara analisa komposit dari 9 indikator adalah yang masih agak rentan (prioritas 3) yaitu angka prevalensi stunting.

Hal hal yang kemungkinan menyebabkan capaian Indeks Ketahanan pangan tahun 2024 masih belum mencapai target :

1. Naikkan persentase rumah tangga tanpa akses Listrik (0,12 %)
2. Angka prevalensi stunting yang masih cukup tinggi (26,0)

Tabel Cut Off Point Indeks Ketahanan Pangan

Kelompok IKP	Kabupaten	Keterangan
IKP – 1	≤ 41,52	Sangat rentan
IKP – 2	>41,52 – 51,42	Rentan
IKP – 3	>51,42 -59,58	Agak rentan
IKP – 4	>59,58 – 67,75	Agak tahan
IKP – 5	>67,75 – 75,68	Tahan
IKP – 6	>75,68	Sangat Tahan

Hasil Analisa IKP tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 Kabupaten Purbalingga walaupun terjadi kenaikan dan penurunan, akan tetapi Kabupaten Purbalingga masih termasuk kedalam Kabupaten yang sangat Tahan Pangan. Hal ini terlihat dari nilai IKP Kabupaten Purbalingga yang selalu di atas 75,68.

Tabel 3.66 Capaian Kinerja Skor Pola Pangan Harapan

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Capaian 2023	Capaian 2024	Capaian realisasi (%)	Capaian akhir renstra (2021-2026)
Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Angka	86,9	88,8	80,3	84,1	90,7	90,3	98 %	89,2

Dengan menggunakan aplikasi yang sudah distandarkan, maka dengan menginput data susenas diperoleh hasil sebagai berikut berdasarkan pada kecukupan energy sebesar 2.100 kkal/kapita/hari.

Tabel : Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi Pangan Penduduk Berdasarkan Data Survey Sosial Ekonomi Nasional Kabupaten Purbalingga Tahun 2023

No	KELOMPOK PANGAN	BERAT (Gram)	KKAL/KAP	%	AKE	BOBOT	SKOR AKTUAL	SKOR AKE	SKOR MAKS	SKOR PPH
1	Padi-padian									

		266,5	1.036	53,2	49,3	0,5	26,6	24,7	25,0	24,7
2	Umbi-umbian	42,7	50	2,6	2,4	0,5	1,3	1,2	2,5	1,2
3	Pangan Hewani	75,4	201	10,3	9,6	2,0	20,6	19,1	24,0	19,1
4	Minyak/ Lemak	30,7	276	14,2	13,2	0,5	7,1	6,6	5,0	5,0
5	Buah/biji berminyak	2,2	13	0,7	0,6	0,5	0,3	0,3	1,0	0,3
6	Kacang- kacangan	30,8	90	4,6	4,3	2,0	9,3	8,6	10,0	8,6
7	Gula	20,8	79	4,1	3,8	0,5	2,0	1,9	2,5	1,9
8	Sayur dan buah	253,7	145	7,5	6,9	5,0	37,3	34,6	30,0	30,0
9	Lain-lain	56,1	58	3,0	2,8	-	-	-	-	-
			1.948	100,0	92,8		104,4	96,9	100,0	90,7

Note : Berdasarkan data tahun berjalan

Mengacu pada data di atas maka dapat dijabarkan bahwa untuk kelompok pangan padi-padian dengan skor PPH 24,2 terjadi penurunan sebesar 0,8 dibandingkan dengan skor padi-padian maksimal. Bila dibandingkan dengan skor padi-padian dengan data tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 0,5. Ini menunjukkan terjadi pola konsumsi kelompok padi-padian terjadi tren menurun di masyarakat. Dengan asumsi terjadinya penurunan daya beli masyarakat atau terjadi pergeseran pola konsumsi di sebagian masyarakat dengan tidak hanya mengkonsumsi beras dan lain lain. Pada kelompok umbi-umbian skor pph baru

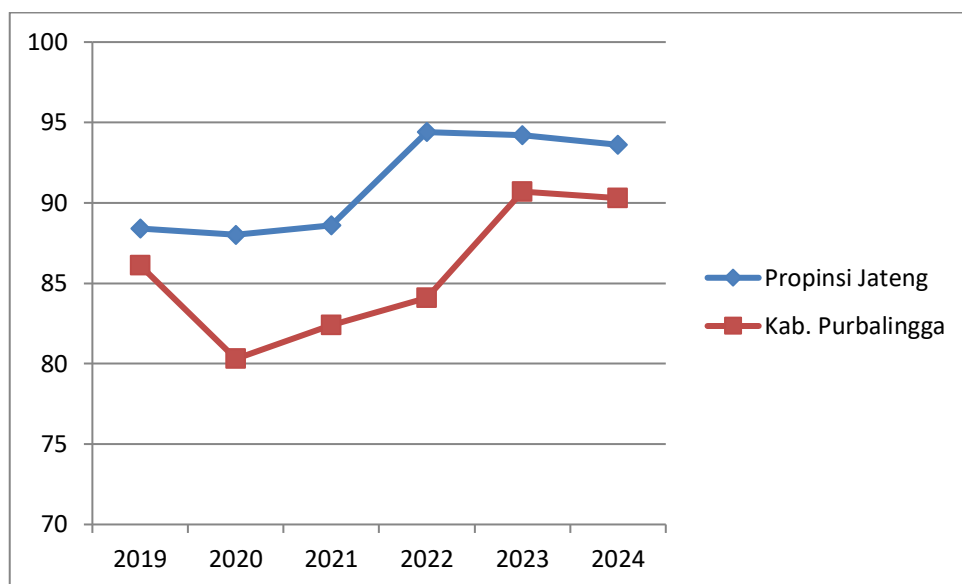
mencapai 1 atau 40% dibandingkan dengan skor maksimal sebesar 2,5. Ini menunjukkan konsumsi umbi-umbian masih rendah di kalangan masyarakat sehingga masih memungkinkan untuk ditingkatkan konsumsi umbi-umbian. Dan bila dibandingkan dengan skor umbi-umbian tahun 2023 terjadi penurunan sebesar 0,2 yaitu dari 1,2 menjadi 1. Untuk kelompok pangan hewani skor pph 19,9 atau 82,92 % dari skor maks sebesar 24,0. Bila dibandingkan dengan skor pangan hewani tahun 2023 untuk pangan hewani sebesar 19,1 maka sesungguhnya konsumsi pangan hewani mengalami peningkatan skor sebesar 0,8 atau 4,8 %. Kemungkinan kenaikan ini disebabkan oleh turunnya harga daging ayam dan telur, yang fluktuatifnya relative cepat. Atau juga dapat dipicu oleh konsumsi disaat musim hajatan. Untuk kelompok minyak /lemak skor pph sudah mencapai angka maksimal sama dengan skor pph tahun sbelumnya yaitu sebesar 5,0. Akan tetapi bila dilihat dari skor AKE untuk lemak dan minyak sudah melebihi skor maksimal 5,9 dimana skor maksimal hanya 5,0, sehingga masih kelebihan 0,9. Hal ini dimungkinkan dari budaya pola makan masyarakat Kabupaten Purbalingga yang sangat menyukai gorengan dan tumis sayuran / oseng sayuran dengan menggunakan minyak yang banyak. Kelompok buah/biji berminyak tidak mengalami perubahan tidak naik dan tidak turun, baik pada data tahun berjalan maupun data akhir tahun. Angka tersebut baru mencapa 20 % dibandingkan dengan skor mask sebesar 1,0. Artinya masih memungkinkan untuk dinaikan konsumsi buah/biji berminyak. Kelompok kacang-kacangan pencapaian skor pph sebesar 8,6 atau 86 % dari skor maksimal sebesar 10,0. Mengacu pada skor maskimal sudah barang tentu konsumsi kacang-kacangan masih perlu ditingkatkan dengan memaksimalkan konsumsi kacang lokal. Kelompok gula pencapaian skor pph sebesar 1,5 atau 60 % dari skor maksimal sebesar 2,5. Masih memungkinkan untuk meningkatkan konsumsi gula. Bila dibandingkan

dengan data tahun sebelumnya bahwa kelompok pangan gula dengan skor 1,9 maka skor pph akhir menurun sebesar 0,5. Untuk kelompok sayur dan buah mencapai skor maksimal yakni 30 atau 100 dan apabila dibandingkan dengan skor pph tahun sebelumnya sama, akan tetapi bila dilihat dari skor AKE sayur dan buah sebesar 37,1 atau 124 % dari skor maksimal sebesar 30 . Kemungkinan asumsi adalah adanya kegiatan pekarangan pangan lestari (P2L) yang hampir mencapai lebih dari 20 lokasi / desa dan atau kelurahan dengan produksi utama sayuran. Sehingga jangkauan konsumsi sayur menjadi lebih luas. Disebabkan produksi KWT yang sebagian dikonsumsi oleh masyarakat lingkungan.

d. Perbandingan Skor PPH Kabupaten dengan Skor PPH Propinsi Jawa Tengah

PERBANDINGAN	SKOR PPH					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Propinsi Jateng	88,4	88,02	88,6	94,4	94,2	93,61
Kab. Purbalingga	86,1	80,3	82,4	84,1	90,7	90,3

Dari skor diatas dapat dibuat grafik perbandingan sbb :



Grafik perbandingan skor PPH Kab. Purbalingga dengan Propinsi Jateng

Dari grafik diatas terlihat bahwa trend grafik skor PPH terdapat kemiripan, dimana pada tahun 2020 skor PPH kabupaten Purbalingga terjadi penurunan yang sangat tajam dari skor 86,1 (tahun 2019) menjadi 80,3 (tahun 2020). Hal ini dimungkinkan pada tahun 2020 terjadi wabah covid-19 dimana pada saat itu terjadi PHK besar-besaran karena banyak usaha yang tutup. Hal ini berimbas pada pola makan masyarakat dimana penerapan menu makan B2SA sangat sulit diterapkan karena penghasilan hanya cukup untuk makan kenyang saja. Memasuki tahun 2021 skor PPH mulai mengalami kenaikan sampai dengan tahun 2023. Tahun 2024 Skor PPH mengalami penurunan skor sebesar 0,4. Penurunan skor di kelompok pangan padi-padian, umbi-umbian, buah/biji berminyak dan gula

Untuk mendukung Sektor pangan didukung 3 program yakni:

1. **Program** Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan pangan Masyarakat
Program ini mengintervensi salah satu indikator dari 9 indikator IKP yaitu Rasio konsumsi normative perkapita terhadap produksi bersih. Dan angka

konsumsi ikan mengintervensi dari indicator persentase balita dengan indicator dibawah standart dan stunting

Pola konsumsi pangan merupakan perilaku paling penting yang dapat mempengaruhi keadaan gizi seseorang. Hal ini disebabkan karena kuantitas dan kualitas pangan yang dikonsumsi akan mempengaruhi tingkat kesehatan seseorang. Agar tubuh tetap sehat dan terhindar dari berbagai penyakit terkait gizi, maka pola konsumsi pangan masyarakat perlu ditingkatkan kearah konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman (B2SA).Aspek konsumsi pangan sangat erat kaitannya terhadap kualitas SDM. Bukti empiris menunjukkan bahwa kualitas SDM sangat ditentukan oleh status gizi yang baik, dan status gizi yang baik ditentukan oleh jumlah asupan pangan yang dikonsumsi. Selanjutnya, masalah gizi yang terjadi pada masa tertentu akan menimbulkan masalah pembangunan dimasa yang akan datang. Dikegiatan ini dilakukan di Mi Maarif Jingsang selama 6 hari pembeberian makanan bergizi gratis.

2. Program Pengelolaan sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan kemandirian Pangan

Diprogram ini DKPP melakukan monev dan evaluasi terhadap lumbung pangan yang ada di masyarakat serta pengadaan gabah cadangan pangan pemerintah untuk cadngan ketika ada kebencanaan dan kebutuhan mendadak sehingga Beras segera ada ketika dibutuhkan. Saat ini CPPD di Kabupaten Purbalingga terdapat 45,150 ton gabah kering siap giling sebagai cadangan pangan pemerintah.program ini mengintervensi IKP yaitu persentase rumah tangga dengan proporsi untuk pangan lebih dari 65 % terhadap total pengeluaran

3. Program Penanganan Kerawanan Pangan

Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Dimana kegiatan ini membagikan sapi kurban untuk dibagikan dagingnya kepada warga kurang mampu dengan data sebagai berikut;

NO	Kelompok Penerima	Nama Penerima	Nomor HP	Jumlah Penerima (orang)	Jumlah total daging
1	Masjid Darussalam Rt 02 Rw 01 Desa Pangempon Kecamatan Kejobong	Mulyanto	0855 7687 706	124	186 kg
2	Masjid Baitul Falah Rt 01 Rw 01 Desa Kalimantan Kulon Kecamatan Kalimantan	Wagiman	0821 3896 0200	184	92 kg
3	Mushola Abdurrokhim 2 Jl. Raya Karanggambas Rt 01 Rw 04 Dusun 2 Desa Karanggambas	Karsono	0852 2775 7383	170	133 kg
4	Mushola Al Karromah Desa Plumutan Rt 18 Rw 06 Dusun 3 Kecamatan Kemangkon	Sukadi	0852 2544 7009	170	141 kg
5	Mushola An Nur Sirongge Rt 03 Rw 03 Jl. Tentara Pelajar Kelurahan Kembaran Kulon	Muslim Winarto	0822 2076 2127	135	108 kg
6	Masjid Ar Rohman Rt 01 Rw 09 Kelurahan Purbalingga Wetan	Amron Falahudin	0856 4792 3232	172	121 kg
7	Pengurus Baitul Muslimin Jl. S. Parman Bancar	Tajri	0813 9002 1838	174	143 kg
8	Masjid An Nur Dusun Gemenggeng Rt 04 Rw 20 Desa Pengadegan	Sukarsono	0857 1242 9249	129	129 kg
9	Masjid Al Ma'ruf Rt 07 Rw 06 Desa Gambarsari Kecamatan Kemangkon	Rofi	0823 1386 5150		
10	Masjid Nurul Barokah Rt 01 Rw 01 Desa Beji Kecamatan Bojongsari	Afif Yuliana	0857 1298 0361	175	175 kg
11	Mushola Al Masruriyah Rt 18 Rw 08 Desa Majasem Kecamatan Kemangkon	Musalim	0896 8195 5566	250	145 kg
12	Masjid Baitul Aman Rt Rw 03 Desa Gondang Kecamatan Karangreja	Fathan	0857 9983 0365		
13	Masjid Al Ikhlas Rt 05 Rw 02 Desa Serang Kecamatan Karangreja	Slamet Priyanto	0888 4029 364	100	135 kg
14	Masjid Baiturrohimi Rt 02 Rw 10 Desa Tlahab Lor Kecamatan Karangreja	Tardi Adi Mulyanto	0821 2868 1396	116	116 kg
15	Mushola AL MIZAN Jl. Jensud Purbalingga Wetan	Eko YP	0813 1084 2088	248	141 kg

	JUMLAH				
--	--------	--	--	--	--

4. Program Pengawasan Keamanan Pangan

Meningkatnya implementasi SAKIP Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2022	Capaian 2023	Target 2024	Capaian 2024	Target Capaian	Target Masa Akhir Renstra (2021-2026)
Nilai SAKIP DKPP	Angka	71,21	63,96	68,68	69,41	101,6	72

Dari capaian SAKIP DKPP mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari tahun 2023 sebesar 63,96 ke angka 69,41 naik 5,45 hal ini disebabkan karena adanya perbaikan-perbaikan di dokumen-dokumen sebagai penunjang penilaian telah dicukupi.

Rincian nilai setiap komponen sebagai berikut :

No	Komponen	Bobot komponen	Bobot Sub Komponen			Total Nilai
			Keberadaan (20%)	Kualitas (30%)	Pemanfaatan (50%)	
1	Perencanaan Kinerja	30,00	4,20	6,30	10,50	21,00
2	Pengukuran Kinerja	30,00	4,80	6,30	10,50	21,00
3	Pelaporan Kinerja	15,00	2,4	2,70	4,50	9,60
4	Evalusi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	3,50	4,50	7,50	15,50

Nilai Akuntabilitas Kinerja	100,00	14,90	19.80	33,00	69,41
------------------------------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Meningkatnya kematangan OPD DKPP

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024	%	Target Masa Akhir Rentra (2021-2026)
Meningkatnya implementasi SAKIP Dinas Pertanian	Nilai Kematangan OPD	Nilai	38	38	100	-

Hasil atas evaluasi kematangan Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 mendapatkan **nilai 38 atau predikat Tinggi** yang berarti bahwa DKPP Kabupaten Purbalingga tata laksana (proses bisnis), budaya organisasi, dan inovasi sudah baik.

2. Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Perikanan

Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024	%	Target Masa Akhir Rentra (2021-2026)
Meningkatnya nilai tambah sektor perikanan	Nilai PDRB Sektor Perikanan	Rupiah	455.000.000.000	N/A	N/A	475.000.000.000

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator ekonomi makro untuk mengetahui kondisi ekonomi disuatu daerah dalam suatu periode tertentu.

PDRB ATAS DASAR HARGA BERLAKU SEKTOR PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN (JUTA RUPIAH)

SEKTOR	TAHUN				
	2019	2020	2021	2022	2023
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6.533.311,46	6.781.605,20	6.997.823,32	7.569.769,42	7.994.833,10
1. Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	5.995.875,70	6.225.590,20	6.432.004,85	6.957.350,27	7.338.299,91
a. Tanaman Pangan	1.194.950,47	1.231.889,00	1.212.055,99	1.257.404,36	1.373.232,05
b. Tanaman Hortikultura Semusim	116.492,80	123.388,90	123.506,57	131.138,55	130.867,06
c. Perkebunan Semusim	29.887,44	29.575,30	28.429,37	29.129,51	29.428,06
d. Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya	1.956.383,51	2.182.441,90	2.239.321,79	2.501.838,39	2.449.619,81
e. Perkebunan Tahunan	1.053.095,37	1.045.416,00	1.131.334,42	1.233.993,62	1.396.654,43
f. Peternakan	1.521.572,34	1.487.942,10	1.567.814,94	1.667.493,54	1.818.083,83
g. Jasa Pertanian dan Perburuan	123.493,77	124.937,00	129.541,77	136.352,30	140.414,67
2. Kehutanan dan Penebangan Kayu	127.029,61	130.310,70	134.399,97	138.498,37	147.245,67
3. Perikanan	410.406,15	425.704,30	431.418,50	473.920,78	509.287,52

Berdasarkan data yang tersedia, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Purbalingga pada sektor perikanan menunjukkan pertumbuhan yang positif dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2022, PDRB sektor perikanan mencapai Rp473 miliar, meningkat menjadi Rp509 miliar pada tahun 2023. Data untuk tahun 2024 belum tersedia hingga saat ini karena masih menunggu rilis dari Badan Pusat Statistik. Pertumbuhan ini mencerminkan peningkatan aktivitas ekonomi di sektor perikanan Kabupaten Purbalingga. Faktor-faktor yang mungkin berkontribusi terhadap pertumbuhan ini antara lain peningkatan produksi perikanan budidaya, perbaikan infrastruktur pendukung, serta program pemerintah daerah yang mendukung pengembangan sektor perikanan. Menurut data dari Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga, produksi perikanan budidaya menunjukkan tren peningkatan selama periode 2018 hingga 2023. Hal ini sejalan dengan peningkatan PDRB sektor perikanan yang tercatat. Berikut adalah analisis lengkap mengenai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada sektor perikanan di Kabupaten Purbalingga tahun 2024:

Berdasarkan data historis tren PDRB sektor perikanan di Kabupaten Purbalingga dari tahun 2020 hingga 2024:

- **2020:** 425 Miliar
- **2021:** 431 Miliar (Peningkatan 1.41%)
- **2022:** 473 Miliar (Peningkatan 9.74%)
- **2023:** 509 Miliar (Peningkatan 7.61%)
- **2024:** menunggu rilis dari Badan Pusat Statistik (BPS)

Terjadi peningkatan PDRB sektor perikanan setiap tahun, menunjukkan pertumbuhan yang konsisten. Lonjakan signifikan terjadi pada tahun 2022 dengan peningkatan sebesar 9.74%, mungkin disebabkan oleh faktor-faktor seperti peningkatan produksi, investasi, atau kebijakan pemerintah yang mendukung sektor perikanan. Pertumbuhan tetap stabil di atas 7%, menunjukkan bahwa sektor perikanan terus berkembang dengan baik.

a. Perbandingan Target Tahun 2023 dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Target PDRB sektor perikanan tahun 2023 sebesar 445 miliar, tetapi realisasi mencapai 509 miliar (114,38%), artinya terjadi peningkatan sebesar 64 miliar dari target. Capaian ini menunjukkan pertumbuhan yang lebih baik dari yang direncanakan, menandakan adanya faktor positif yang mendorong sektor perikanan di Kabupaten Purbalingga. Kinerja sektor perikanan tahun 2023 melampaui ekspektasi dengan

pencapaian 14,38% di atas target, menunjukkan peningkatan produktivitas dan nilai ekonomi sektor ini.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022

PDRB sektor perikanan meningkat dari 473 miliar di tahun 2022 menjadi 509 miliar di tahun 2023, mengalami pertumbuhan sebesar 7,61% (36 miliar). Peningkatan ini mencerminkan keberlanjutan tren positif dalam sektor perikanan, didukung oleh produktivitas yang lebih tinggi dan permintaan pasar yang lebih besar. Kenaikan signifikan ini menunjukkan sektor perikanan semakin berkontribusi terhadap ekonomi daerah.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Tahun 2024

Target PDRB tahun 2024 sebesar 455 miliar justru lebih rendah dibandingkan realisasi tahun 2023 (509 miliar), menunjukkan adanya revisi target yang konservatif. Jika tren pertumbuhan sebelumnya (7,61%) dipertahankan, PDRB sektor perikanan seharusnya bisa mencapai lebih dari 509 miliar. Adanya revisi target ini perlu dianalisis lebih lanjut, apakah disebabkan oleh faktor eksternal seperti potensi penurunan produksi atau kondisi pasar yang tidak menentu. Penurunan target PDRB tahun 2024 dibandingkan realisasi 2023 perlu dievaluasi ulang agar sektor perikanan tetap mengalami pertumbuhan positif.

d. Analisa Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan serta Solusi yang Telah Dilakukan

Beberapa faktor utama yang mendukung pertumbuhan sektor perikanan di Kabupaten Purbalingga antara lain:

- Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya. Kabupaten Purbalingga memiliki potensi besar dalam perikanan budidaya, terutama ikan air tawar seperti lele, nila, dan gurame. Inovasi teknologi seperti bioflok dan intensifikasi budidaya telah meningkatkan produktivitas.
- Dukungan Kebijakan dan Infrastruktur. Program bantuan benih dan pakan dari pemerintah daerah, Pembangunan atau rehabilitasi kolam budidaya dan Pelatihan dan pendampingan bagi pembudidaya ikan.
- Permintaan Pasar yang Meningkat. Peningkatan konsumsi ikan dan diversifikasi produk olahan perikanan seperti abon ikan, bakso ikan, dan nugget ikan turut mendorong pertumbuhan sektor ini.

- Inovasi dan Diversifikasi Produk. Adanya inovasi dalam metode budidaya serta diversifikasi produk berbasis ikan memperluas pangsa pasar dan meningkatkan nilai tambah produk perikanan.

Meskipun mengalami pertumbuhan, sektor perikanan masih menghadapi beberapa tantangan, seperti:

- Perubahan Iklim dan Kualitas Air. Fluktuasi suhu, curah hujan tinggi, dan pencemaran air dapat menyebabkan kematian ikan massal dan menurunkan produktivitas budidaya.
- Keterbatasan Modal dan Akses Pembiayaan. Banyak pelaku usaha perikanan skala kecil masih mengalami keterbatasan modal untuk ekspansi usaha atau adopsi teknologi baru.
- Persaingan dengan Produk Impor. Produk perikanan dari luar daerah atau impor bisa menjadi pesaing bagi produk lokal, terutama jika harga lebih murah dan distribusinya lebih luas.
- Permasalahan Distribusi dan Pemasaran. Kurangnya akses pasar yang luas serta fluktuasi harga ikan dapat menyebabkan ketidakstabilan pendapatan bagi pembudidaya ikan.
- Hama dan Penyakit: Serangan hama dan penyakit pada ikan dapat mengurangi produksi dan meningkatkan biaya perawatan.

e. Program atau Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

- ✓ Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas
 - Bantuan peralatan tangkap dan teknologi budidaya bagi nelayan dan pembudidaya ikan.
 - Pengembangan sistem bioflok dan bantuan pakan ikan serta benih untuk meningkatkan efisiensi budidaya.
- ✓ Program Hilirisasi dan Pengolahan Produk Perikanan

- Penguatan industri pengolahan hasil perikanan untuk meningkatkan nilai tambah produk lokal.
- Fasilitasi promosi produk perikanan dalam negeri.
- ✓ Program Keberlanjutan dan Konservasi Sumber Daya Perikanan
 - Restocking ikan di perairan umum
 - Pengembangan kebijakan perikanan berkelanjutan untuk mencegah eksploitasi berlebihan.

Program/Kegiatan yang Menjadi Hambatan atau Tantangan

- ✗ Kurangnya Investasi di Infrastruktur Perikanan
 - Keterbatasan fasilitas pengolahan menyebabkan ketergantungan pada rantai distribusi yang kurang efisien.
- ✗ Minimnya Penelitian dan Pengembangan Teknologi Budidaya
 - Kurangnya riset mengenai penyakit ikan dan inovasi teknologi budidaya menyebabkan ketergantungan pada metode konvensional yang kurang efisien.

Sektor perikanan di Kabupaten Purbalingga menunjukkan pertumbuhan yang positif dan konsisten dari tahun 2020 hingga 2024. Dengan dukungan kebijakan pemerintah, peningkatan produksi, dan investasi yang memadai, sektor ini memiliki potensi besar untuk terus berkontribusi pada perekonomian masyarakat. Namun, tantangan seperti perubahan iklim, hama, dan keterbatasan infrastruktur perlu diatasi untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan. Secara keseluruhan, sektor perikanan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian Kabupaten Purbalingga. Dengan adanya tren pertumbuhan yang positif, diharapkan sektor ini dapat terus berkembang dan memberikan dampak yang lebih besar bagi kesejahteraan masyarakat setempat.

Nilai capaian Produksi perikanan Tahun 2024

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2023	TARGET 2024	CAPAIAN 2024	Capaian (%)	Target Masa Akhir Rentra (2021-2026)

	Meningkatnya Nilai Produksi Ikan	Nilai Produksi Perikanan tangkap, hias, budidaya dan pengolahan	Rupiah	306.642.970.000	311.863.013.400	355.522.255.217	113,99	324.505.130.000
--	----------------------------------	---	--------	-----------------	-----------------	-----------------	--------	-----------------

Sektor perikanan di Kabupaten Purbalingga menunjukkan pertumbuhan yang positif dan konsisten dari tahun 2020 hingga 2024. Dari data diatas terdapat capaian 113,99 % dimana capaian produksi melampaui target dan nilainya secara capaian kinerja sangat tinggi. Hal ini karena adanya dukungan kebijakan pemerintah, peningkatan produksi, dan investasi yang memadai, sektor ini memiliki potensi besar untuk terus berkontribusi pada perekonomian masyarakat. Namun, tantangan seperti perubahan iklim, hama, dan keterbatasan infrastruktur perlu diatasi untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan. Secara keseluruhan, sektor perikanan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian Kabupaten Purbalingga. Dengan adanya tren pertumbuhan yang positif, diharapkan sektor ini dapat terus berkembang dan memberikan dampak yang lebih besar bagi kesejahteraan masyarakat setempat. Sektor perikanan memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian masyarakat Kabupaten Purbalingga, antara lain:

- Penyerapan Tenaga Kerja: Sektor perikanan menyerap banyak tenaga kerja, baik di bidang budidaya, penangkapan, maupun pengolahan ikan.
- Meningkatkan Pendapatan Pembudidaya Ikan. Dengan pertumbuhan PDRB yang positif, pendapatan pembudidaya ikan juga meningkat, yang secara langsung meningkatkan daya beli masyarakat.
- Ketahanan Pangan dan Gizi Masyarakat. Peningkatan produksi ikan turut berkontribusi dalam menyediakan sumber protein bagi masyarakat, sehingga mendukung ketahanan pangan dan perbaikan gizi.
- Meningkatkan Investasi Lokal. Dengan pertumbuhan sektor ini, semakin banyak investor lokal maupun luar daerah yang tertarik untuk menanamkan modal dalam bisnis perikanan.
- Diversifikasi Ekonomi: Sektor perikanan membantu diversifikasi ekonomi Kabupaten Purbalingga, mengurangi ketergantungan pada sektor pertanian konvensional.

Proyeksi dan Rekomendasi

Sementara itu rincian capaian produksi perikanan tahun 2024 yang meliputi produksi perikanan tangkap, produksi perikanan budidaya, produksi ikan hias, produksi olahan ikan dan produksi benih ikan sebagai berikut :

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023	Target 2024	Capaian 2024	Capaian (%)	Capaian akhir renstra (2021-2026)
Produksi Tangkap (Ton)	267	280	272.	270,742	249,300	275	286,926	104	281
Produksi Budidaya (Ton)	6.886	6.376	6.981	6.273	6.123	6.766	6.130	90	7.040
Produksi Olahan (Ton)	2.035	2.112	2.202	2.269	2.337	2.241	2.364	105	2.292
Produksi Ikan Hias (ekor)	11.974.000	15.782.500	16.299.525	15.198.523	15.785.420	-	15.946.580	-	-
Produksi benih ikan (ekor)	252.271.000	277.887.000	280.015.000	366.710.000	277.510.000	-	255.260.000	-	-

Analisis Produksi Perikanan Budidaya di Kabupaten Purbalingga

a. Perbandingan Target Tahun 2024 dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Untuk angka produksi budidaya tahun 2024 dari target 6.766. ton tercapai 6.130 ton sehingga terjadi kekurangan produksi sebesar 643 ton. Produksi perikanan budidaya belum mampu mencapai target yang ditetapkan, dan peningkatan produksi dari tahun ke tahun sangat kecil, mengindikasikan adanya kendala yang signifikan. dikarenakan beberapa faktor seperti berkurangnya jumlah pembudidaya ikan, faktor curah hujan yang kurang efek kemarau panjang , ketersediaan air yang berkurang efek pembangunan saluran irigasi Bendung slinga efek tersebut mengakibatkan angka konsumsi ikan berkurang. Dari ikan hias juga mengalami penurunan produksi karena menurunnya animo masyarakat memelihara ikan hias.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Realisasi produksi 2024 hanya naik 7 ton (0,11%) dibandingkan 2023, yang menunjukkan stagnasi produksi. Tingkat pertumbuhan produksi yang sangat kecil ini menunjukkan adanya kendala yang masih belum terselesaikan. Tidak ada pertumbuhan yang signifikan dalam produksi, menunjukkan perlunya langkah strategis untuk mendorong peningkatan produksi yang lebih optimal.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Tahun 2025

Target produksi tahun 2025 meningkat menjadi 6.902 ton, yang berarti diperlukan tambahan produksi sebesar 772 ton (12,6%) dibandingkan realisasi tahun 2024. Jika tren pertumbuhan stagnan seperti 2023-2024 (hanya +0,11%), maka target 2025 sulit dicapai tanpa adanya perubahan signifikan dalam kebijakan, teknologi, dan manajemen produksi. Strategi peningkatan produksi yang lebih agresif diperlukan untuk mencapai target 2025, termasuk perbaikan dalam infrastruktur, teknologi, dan pemberdayaan pembudidaya.

d. Analisa Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan serta Solusi yang Telah Dilakukan

Penyebab Keberhasilan Produksi Perikanan Budidaya

- ✓ Peningkatan Kesadaran Pembudidaya terhadap Teknologi
 - Sebagian pembudidaya mulai mengadopsi sistem bioflok dan budidaya ikan kolam terpal
 - Penggunaan benih unggul dan sistem monitoring kualitas air yang lebih baik membantu menjaga tingkat kelangsungan hidup ikan.
- ✓ Dukungan Pemerintah dalam Bantuan Sarana dan Prasarana
 - Pemberian bantuan benih dan pakan kepada kelompok pembudidaya.
 - Penyuluhan dan pelatihan manajemen budidaya ikan untuk meningkatkan kapasitas pembudidaya.
- ✓ Peningkatan Pasar dan Permintaan Produk Perikanan
 - Meningkatnya permintaan pasar baik di dalam maupun luar daerah meningkatkan motivasi produksi bagi sebagian pembudidaya.

Penyebab Kegagalan dan Hambatan Produksi

- ✗ Fluktuasi Harga Pakan Ikan yang Tinggi
 - Harga pakan ikan yang terus meningkat menyebabkan beban produksi lebih tinggi dan margin keuntungan pembudidaya menurun.
- ✗ Serangan Penyakit yang Menghambat Produksi
 - Penyakit ikan seperti Aeromonas dan Streptococcus menyebabkan angka kematian tinggi, terutama di musim hujan.

- Kurangnya fasilitas kesehatan ikan yang memadai di daerah budidaya.
- ✗ Kurangnya Infrastruktur dan Teknologi Budidaya
 - Pengolahan pasca-panen menyebabkan harga ikan turun saat panen melimpah.
 - Kurangnya akses air bersih dan pengelolaan limbah budidaya berdampak negatif pada produktivitas ikan.
- ✗ Terbatasnya Akses Permodalan bagi Pembudidaya Kecil
 - Banyak pembudidaya mengalami keterbatasan modal untuk meningkatkan kapasitas produksi.
 - Skema kredit usaha perikanan masih belum menjangkau seluruh pembudidaya dengan optimal.

Solusi yang Telah Dilakukan:

- ✓ Peningkatan pengawasan kesehatan ikan melalui sosialisasi dan penyediaan fasilitas kesehatan ikan di sentra budidaya.
- ✓ Diversifikasi pakan berbasis bahan lokal untuk mengurangi ketergantungan pada pakan impor yang mahal.

e. Program atau Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Maupun Kegagalan pada Pencapaian Kinerja Perikanan Budidaya di Kabupaten Purbalingga

Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

- ✓ Bantuan Sarana Produksi
 - Penyediaan benih unggul dan pakan bersubsidi kepada kelompok pembudidaya.
 - Pelatihan penerapan teknologi budidaya berbasis bioflok dan kolam terpal. Pelatihan budidaya perikanan sebanyak 60 orang yang terdiri atas pelatihan budi aya nila, Gurame dan lele .
 - Bantuan hibah untuk kelompok sebagai bentuk pemberdayaan berupa hibah uang kepada pembudidaya yakni dengan jumlah penerima bantuan sebanyak 39 Pokdakan.
- ✓ Pengembangan Infrastruktur dan Pasar
 - Pembangunan sentra distribusi perikanan untuk memudahkan pemasaran hasil panen.

Program/Kegiatan yang Menjadi Hambatan

✗ Minimnya Investasi dalam Infrastruktur Perikanan

- Keterbatasan cold storage menyebabkan harga ikan turun saat panen berlimpah.
- Kurangnya infrastruktur pengolahan pasca-panen menghambat peningkatan nilai tambah produk.

✗ Keterbatasan Teknologi dan SDM

- Masih banyak pembudidaya yang menggunakan metode tradisional dengan efisiensi rendah.

Produksi perikanan budidaya tahun 2024 belum mencapai target yang diharapkan, dan peningkatannya dari tahun sebelumnya hanya 0,11%, menunjukkan adanya stagnasi produksi. Fluktuasi harga pakan, serangan penyakit, serta kurangnya infrastruktur dan akses permodalan menjadi kendala utama dalam pencapaian target produksi. Target tahun 2025 sebesar 6.902 ton masih cukup jauh dari realisasi 2024 (6.130 ton), sehingga diperlukan langkah strategis untuk meningkatkan produksi yaitu peningkatan investasi infrastruktur perikanan dan fasilitas pengolahan hasil perikanan, penguatan akses permodalan dan subsidi pakan bagi pembudidaya kecil; peningkatan riset dan pengendalian penyakit ikan untuk mengurangi angka kematian ikan; optimalisasi pemasaran dan distribusi agar hasil panen dapat terserap dengan harga yang lebih stabil. Dengan implementasi kebijakan yang lebih tepat, produksi perikanan budidaya di Kabupaten Purbalingga dapat tumbuh lebih optimal dan mencapai target di tahun mendatang.

Analisis Produksi Olahan Ikan di Kabupaten Purbalingga

a. Perbandingan Target Tahun 2024 dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Realisasi produksi olahan ikan tahun 2024 mencapai 2.364 ton, melebihi target sebesar 123 ton atau 5,49%. Pencapaian ini menunjukkan peningkatan produktivitas dalam sektor pengolahan ikan. Produksi olahan ikan melampaui target yang ditetapkan untuk tahun 2024.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Produksi olahan ikan tahun 2024 meningkat 1,16% dibandingkan dengan tahun 2023. Peningkatan ini menunjukkan tren positif, meskipun pertumbuhannya masih relatif kecil.

Ada pertumbuhan dalam produksi olahan ikan dari tahun ke tahun, namun perlu upaya lebih untuk meningkatkan angka produksi secara signifikan.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Tahun 2025

Target produksi 2025 lebih rendah dari capaian 2024, turun sebesar 78 ton atau sekitar 3,3%. Penurunan target ini perlu dievaluasi, apakah disebabkan oleh faktor pasar, produksi, atau kebijakan tertentu. Jika tren peningkatan produksi tetap terjaga, target 2025 yang lebih rendah justru dapat dengan mudah terlampaui.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan serta Solusi yang Telah Dilakukan

Penyebab Keberhasilan

✓ Peningkatan Kapasitas Produksi

- Adopsi teknologi modern dalam pengolahan ikan seperti penggunaan mesin vacuum drying, pendinginan cepat, dan packaging yang lebih baik.
- Peningkatan jumlah UMKM pengolah ikan yang berkontribusi terhadap peningkatan produksi.

✓ Dukungan dari Pemerintah

- Program pelatihan pembuatan produk olahan ikan yang berkualitas dan inovatif pada TP PKK Desa sebanyak 40 orang
- Pemberian bantuan peralatan produksi dan fasilitasi pemasaran pada Poklamsar yang merupakan anggaran dari APBN dan APBD

✓ Permintaan Pasar yang Stabil

- Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya konsumsi ikan meningkatkan permintaan produk olahan ikan.
- Ekspansi pasar ke luar daerah turut membantu peningkatan volume produksi.

Penyebab Kegagalan dan Hambatan Produksi

✗ Fluktuasi Harga Bahan Baku

- Ketersediaan ikan segar yang terbatas di musim tertentu menyebabkan harga bahan baku naik, sehingga berpengaruh terhadap biaya produksi.

✗ Persaingan dengan Produk Luar Daerah

- Masuknya produk olahan ikan dari luar daerah dengan harga lebih kompetitif membuat UMKM lokal sulit bersaing.

Solusi yang Telah Dilakukan:

- ✓ Peningkatan kerja sama dengan nelayan dan pembudidaya ikan lokal untuk memastikan ketersediaan bahan baku dengan harga stabil.
- ✓ Program promosi dan branding produk lokal agar lebih kompetitif di pasar.

e. Program atau Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Produksi Olahan Ikan

Program yang Mendukung Keberhasilan

- ✓ Pengembangan Sentra Industri Olahan Ikan
 - Peningkatan fasilitas produksi dan inovasi produk olahan ikan berbasis teknologi.
 - Pelatihan UMKM dalam pengolahan, pengemasan, dan pemasaran produk ikan sebanyak 40 orang
- ✓ Pemberian Bantuan Peralatan
 - Penyediaan peralatan pengolahan ikan bagi Poklahsar
- ✓ Penguatan Pemasaran dan Branding Produk Lokal
 - Program promosi digital dan pemasaran berbasis e-commerce.
 - Fasilitasi UMKM untuk mengikuti pameran dan expo produk perikanan.

Faktor Penghambat dan Program yang Masih Perlu Ditingkatkan

✗ Keterbatasan Rantai Distribusi dan Penyimpanan

- Kurangnya infrastruktur penyimpanan ikan menyebabkan ketergantungan pada pemasok luar daerah.
- Tingginya biaya logistik dan distribusi membatasi ekspansi pasar.

✗ Minimnya Inovasi Produk Olahan Ikan

- Banyak produk olahan ikan yang masih tradisional, sehingga sulit bersaing dengan produk modern dari luar daerah.
- Perlu lebih banyak penelitian dan pengembangan untuk menciptakan produk olahan yang lebih inovatif.

Produksi olahan ikan di Kabupaten Purbalingga meningkat dari tahun ke tahun, dengan capaian 2024 yang melebihi target. Faktor keberhasilan utama adalah adopsi teknologi, dukungan pemerintah, dan stabilitas permintaan pasar. Kendala yang masih dihadapi meliputi fluktuasi harga bahan baku, keterbatasan fasilitas penyimpanan, dan persaingan dari luar daerah. Target 2025 yang lebih rendah dari realisasi 2024 perlu dikaji ulang, mengingat tren produksi yang terus meningkat. Dengan strategi yang tepat, produksi olahan ikan di Kabupaten Purbalingga dapat terus tumbuh dan memberikan kontribusi lebih besar bagi perekonomian daerah.

Analisis Produksi Perikanan Tangkap di Kabupaten Purbalingga

a. Perbandingan Target Tahun 2024 dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Dari tabel capaian produksi perikanan tangkap terdapat kenaikan produksi sebesar 286 ton dari target 2024 sebesar 275 ton ada pencapaian produksi perikanan tangkap sebesar 104 % dan dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 249 ton naik sebesar 114 %. Produksi naik dikarenakan secara umum dikarenakan tren mencari ikan disungai dengan memancing menjala semakin meningkat dan cuaca mendukung untuk mencari ikan sehingga angka produksi bisa naik. Realisasi produksi perikanan tangkap tahun 2024 mencapai 286 ton, melampaui target sebesar 11 ton atau 4%. Pencapaian ini menunjukkan adanya peningkatan produktivitas dibandingkan dengan target awal. Produksi perikanan tangkap pada tahun 2024 berhasil melampaui target yang telah ditetapkan.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Produksi perikanan tangkap tahun 2024 meningkat sebesar 14,86% dibandingkan dengan tahun 2023. Peningkatan ini menunjukkan adanya faktor pendukung yang signifikan dalam produksi perikanan tangkap. Tren peningkatan produksi perikanan tangkap cukup baik dari tahun ke tahun.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Tahun 2025

Target produksi tahun 2025 lebih rendah dibandingkan dengan realisasi tahun 2024, turun sebesar 8 ton atau 2,8%. Perlu dilakukan evaluasi untuk mengetahui alasan penurunan target produksi tahun 2025. Jika tren peningkatan produksi tetap terjaga, target 2025 dapat dengan mudah dicapai dan bahkan dilampaui.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan serta Solusi yang Telah Dilakukan

Penyebab Keberhasilan

- ✓ Dukungan Pemerintah dan Pelatihan Nelayan
 - Program peningkatan kapasitas nelayan melalui pelatihan dan bimbingan teknis.
 - Bantuan peralatan seperti jaring, kapal kecil, dan mesin pendingin.
- ✓ Kondisi Ekosistem Perairan yang Baik
 - Upaya pelestarian ekosistem perairan dan pengelolaan sumber daya ikan secara berkelanjutan.
 - Peningkatan populasi ikan melalui program restocking.

Penyebab Kegagalan dan Hambatan Produksi

- ✗ Cuaca dan Kondisi Alam yang Tidak Menentu
 - Perubahan cuaca ekstrem mempengaruhi keberhasilan nelayan dalam menangkap ikan.
- ✗ Ketersediaan Ikan yang Berfluktuasi
 - Penurunan stok ikan di beberapa wilayah tangkap karena overfishing atau perubahan ekosistem.

Solusi yang Telah Dilakukan:

- ✓ Peningkatan program pemantauan dan konservasi perairan untuk menjaga ketersediaan ikan melalui penebaran ikan di perairan umum
- ✓ Pengembangan teknik budidaya ikan tangkap berbasis ekologi untuk menambah populasi ikan.

e. Program atau Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Produksi Perikanan Tangkap

Program yang Mendukung Keberhasilan

- ✓ Bantuan untuk Nelayan
 - Bantuan alat tangkap ramah lingkungan untuk meningkatkan hasil tangkapan tanpa merusak ekosistem.
- ✓ Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Berkelanjutan

- Penanaman kembali (restocking) ikan di perairan umum untuk menjaga populasi ikan tangkap.
 - Penegakan regulasi terhadap alat tangkap ilegal untuk menjaga keseimbangan ekosistem.
 - Pemasangan papan peringatan larangan menangkap ikan secara ilegal
-

Faktor Penghambat dan Program yang Masih Perlu Ditingkatkan

✘ Kurangnya Diversifikasi Usaha Nelayan

- Banyak nelayan masih bergantung pada metode tradisional tanpa diversifikasi usaha (misalnya, kombinasi antara perikanan tangkap dan budidaya ikan di keramba).

Produksi perikanan tangkap tahun 2024 meningkat dibandingkan tahun 2023 dan melampaui target. Keberhasilan didukung oleh peningkatan teknologi tangkap, dukungan pemerintah, dan ekosistem perairan yang terjaga. Kendala utama yang masih dihadapi adalah cuaca ekstrem, fluktuasi ketersediaan ikan, serta keterbatasan infrastruktur penyimpanan. Target produksi 2025 lebih rendah dari capaian 2024, yang perlu dikaji lebih lanjut agar lebih realistis. Dengan strategi yang tepat, produksi perikanan tangkap di Kabupaten Purbalingga dapat terus meningkat dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian daerah.

B. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2024 Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan mendapatkan Anggaran Rp 6.514.185.000,- namun dalam realisasinya anggaran tersebut terserap Rp 6.320.931.924,- (97,03 %) dengan silpa sebesar Rp193.263.076 ,- (2,97 %).

Selanjutnya dilihat total realisasi belanja tidak langsung dan Belanja langsung Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan sebagai berikut :

PROGRAM	ANGGARAN	Realisasi	Sisa anggaran	Persentase Realisasi (%)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.159.376.000	4.977.210.324	182.165.676	96
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	1.600.000	1.530.000	70.000	96
k PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	77.000.000	76,512.200	487.800	99
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	432.800.000	432.480.800	319.200	100
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	15.200.000	15.077.850	122.150	96
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	28.200.000	22.769.900	2.230.100	92
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	753.266.000	746.810.850	7,454.150	99
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	46.744.000	46.392.500	352.500	99
	6.514.185.000	6.320.931.924	193.263.076	97,03

ANALISIS ATAS EFISIENSI ANGGARAN

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSEN	KETERANGAN
Meningkatnya Ketahanan pangan		Indek Ketahanan pangan	Angka/Nilai	526,600.000	524.223.850	99,54	EFISIEN
	Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas konsumsi Pangan	Skor PPH	Angka	526.600.000	524.223.850	99,54	EFISIEN
	Meningkatnya Implementasi SAKIP DKPP	Nilai Sakip DKPP	Angka	5.159.376.000	4.977.210.324	96,47	EFISIEN
		Nilai Kematangan OPD	angka	5.159.376.000	4.977.210.324	96,47	EFISIEN
Meningkatnya Nilai tambah Sektor Perikanan		PDRB Sektor Perikanan	Angka	<u>828.210.000</u>	<u>815.973.250</u>	<u>98,52</u>	<u>EFISIEN</u>
	Meningkatnya Nilai Produksi Ikan	Nilai Produksi Perikanan tangkap, hias, budidaya dan pengolahan	Rupiah	828.210.000	<u>815.973.250</u>	<u>98,52</u>	<u>EFISIEN</u>

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 adalah efisien dengan presentase capaian kinerja 101.94 % diluar capaian PDRB Sub sektor Perikanan dengan persentasi Realisasi keuangan sebesar 97,03 % hal ini menjadikan kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Cukup efisien. Dari Capaian PDRB juga diharapkan bahwa Subsektor perikanan juga akan meningkat sehingga capaian

kinerja ditahun 2024 juga meningkat. Hal ini menmdasari kenaikan PDRB subsector Perikanan yang juga naik tinggi di Thaun 2023

Penerapan sistem penganggaran yang minimal dapat mewujudkan adanya kinerja yang maksimal dengan menerapkan prinsip governance yang dilakukan oleh pemerintah. Dimana adanya penerapan prinsip governance sendiri akan bisa membuat pemerintah bisa mereformasi sistem manajemen keuangan dengan lebih baik lagi. Pada dasarnya sistem keuangan yang sudah direformasi dilakukan guna mendapatkan adanya transparansi serta meningkatkan akuntabilitas sehingga terwujud pemerintahan yang amanah dan juga professional. Adanya penerapan sistem penganggaran yang berbasis kinerja pada dasarnya sangatlah penting untuk diterapkan saat ini. Sebab, dengan begitu maka akan tercipta kinerja yang maksimal dalam sistem penganggaran yang direncanakan tentunya

Didalam tata kelola pemerintahan sendiri pada dasarnya pengelolaan dan pengaturan yang baik akan menghasilkan sesuatu yang lebih optimal. Tentu prinsip anggaran yang lebih minimal diterapkan dalam perencanaan kinerja sendiri akan membantu tercapainya peningkatan yang lebih baik. Adanya anggaran yang sesuai dengan kinerja yang ditunjukkan akan membantu terciptanya transparansi dalam sistem pengelolaan pemerintahan nantinya.

BAB IV PENUTUP

Dari kegiatan yang sudah berjalan bisa diambil capaian kinerja DKPP sebagai berikut.

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2023	TARGET 2024	CAPAIAN 2024	Capaian (%)
Meningkatnya status pangan masyarakat		Indek Ketahanan pangan	Angka/ Nilai	78,05	82,7	78,47	94,88
	Meningkatnya status pangan masyarakat	Skor PPH	Angka	90,7	91	90,3	99,23
	Meningkatnya Kualitas kelembagaan DKPP	Nilai Sakip DKPP	Angka	63,96	<u>68,68</u>	<u>69,41</u>	<u>101,6</u>
		Nilai kematangan OPD			<u>38</u>	<u>38</u>	<u>100</u>
Meningkatnya Nilai tambah Sektor Perikanan		PDRB Sektor Perikanan	Angka	<u>509.287.520.000</u>	<u>455.000.000.000</u>	<u>Blm release</u>	<u>NA</u>
	Meningkatnya Nilai Produksi Ikan	Nilai Produksi Perikanan tangkap, hias, budidaya dan pengolahan	Rupiah	306.642.970.000	311.863.013.400	355.522.255.217	113,99

Dari tabel diatas, pencapaian atas Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Kabupaten Purbalingga di Tahun 2024 menunjukkan rata-rata capaian kinerja 101,94 atau kategori **Sangat Tinggi**. capaian kinerja diatas bisa dilihat

bahwa:

1. Capaian Indek Ketahanan Pangan Masyarakat Purbalingga naik dari tahun 2023 hal ini dikarenakan IKP terdapat 9 indikator sedangkan DKPP hanya menjalankan 1 indikator yang ada. Indikator lain di OPD lain sehingga angka kenaikannya tidak terlalu besar.
2. Capaian skor PPH sudah maksimal naik cukup baik dan ini menunjukkan skor pola pangan harapan masyarakat purbalingga sudah bagus walaupun belum tercapai dari target tahun sebelumnya
3. Nilai sakin belum maksimal dan akan diusahakan untuk bisa naik menyesuaikan terget yang ada
4. Capaian Nilai kematangan OPD juga sesuai target dan akan ditingkatkan untuk tahun yang akan datang
5. PDRB perikanan cukup baik dengan capaian target 2024 jauh dari target yang ditaetapakan tersebut diharapkan bisa mendongkrak perekonomian masyarakat purbalingga khususnya dari sektor perikanan
6. Produksi perikanan ada sedikit penurunan produksi dan belum mencapai dari target yang ada, ini menunjukkan produksi perikanan budidaya dan yang lain perlu ditigkatkan

Langkah langkah yang dilakukan DKPP dalam rencana kinerja agar efektif dan efisien untuk mencapai taerget adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan Ketahanan pangan daerah yang mantap dengan mengembangkansub sistem ketersediaan an istribusi pangan, kewaspadaan dan keamanan pangan serta pengembangan tekhnologi pangan dengan meningkatkan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat yang bermutu, bergizi, dalam jumlah yang cukup dan beragam serta menistribusikan dan diakses.
2. Meningkatkan kemandirian pangan masyarakat melalui kelembagan pangan yang mendukung ketersediaan, distribusi, konsumsi, dan keanekaragaman panganserta keamanan pangan dan kewaspadaan pangan untuk mendorong berfungsinya kelembagaan pangan masyarakat, dengan meningkatkan

kualitas SDM melalui pembinaan, pelatihan atau bimbingan teknis pengelolaan kelembagaan pangan masyarakat.

3. Meningkatkan sinergitas antar lembaga pemerintah dan masyarakat dalam mendukung ketahanan pangan wilayah dengan meningkatkan koordinasi antar lembaga pemerintah dan masyarakat
4. Meningkatkan kemandirian dan daya saing sub sektor Perikanan dengan meningkatkan Produksi dan Nilai Tambah hasil Perikanan melalui penerapan teknologi budidaya, pakan dan genetik ikan.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah lingkup Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 dibuat untuk mencukupi Keterangan Pertanggungjawaban Bupati dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dari Bupati Purbalingga kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Gubernur Jawa Tengah tentang laporan ILPPD kepada Pemerintah, LKJIP kepada DPRD dan ILPPD kepada masyarakat.

Atas perhatiannya kami sampaikan banyak terimakasih dan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Purbalingga, Januari 2025

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN PURBALINGGA

Drs. Mohammad Najib, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19651215 199303 1 010

